

Dukung Santri Mandiri, DPRD Susun Perda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren



DEMAK (KR) - Lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk terlibat dalam kebijakan daerah terhadap pengaturan pesantren. Dengan ditetapkannya Perda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren, diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk turut serta memfasilitasi pengembangan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Demak. Baik dari pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan

masyarakat. Usai penetapan Perda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren, yang merupakan perda inisiatif DPRD, Perda tentang Bangunan Gedung, serta Perda tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Ketua DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet menyampaikan, sebagai kabupaten yang maju dengan sebutan Kota Santri dengan ratusan pondok pesantren di dalamnya, tentunya sudah selayaknya pemerintah daerah memberikan perhatian 'plus' pada dunia pesantren. "Terlebih dengan telah terbitnya UU Nomor 18 tahun 2019 sebagai landasan hukum, semakin wajib hukumnya bagi pemerintah daerah memberikan jaminan kepastian hukum kalangan pesantren. Utamanya ketika pesantren yang tumbuh berkembang di masyarakat dengan keahliannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam rahmatan lil'alam, dengan melahirkan insan beriman yang berakhlak, cinta tanah air dan berakhlakul karimah," urainya,



Ketua DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet bersama Wakil Ketua DPRD Demak dari Fraksi Partai Golkar Nur Wachid, Bupati dr Hj Eisti'nah dan Wabup KH Ali Makhsum saat menandatangani nota persetujuan tiga raperda menjadi perda.

Senin (30/5).

Namun itu saja belum cukup, menurut wakil rakyat dari PDIP itu, santri hendaknya juga mengikuti perkembangan jaman. Artinya, selain berkecukupan ilmu keagamaan, lulusan pesantren wajib memiliki life skill atau keterampilan sebagai

bekalnya menjalani hidup dan menghadapi tantangan jaman.

"Itu lah alasan ada tiga ruh atau spirit yang melandasi penyusunan Perda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren untuk mendukung terciptanya santri mandiri. Yakni pesantren dengan fungsi

pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Terlebih karena dengan pendidikan dan dikuasai atau dimilikinya life skill, dapat turut menurunkan angka kemiskinan," imbuh Pak FBS, demikian Fahrudin Bisri Slamet biasa disapa.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Demak dari Fraksi Kebangkitan Bangsa H Zaynul Fata menyampaikan, seorang santri wajib memahami ilmu agama. Namun tidak hanya sekedar memahami, akan lebih penting ketika mampu mempraktikkannya di lapangan. Sehingga mampu menghadapi tantangan kehidupan sosial yang sebenarnya, dan bermanfaat bagi umat.

Penyusunan Perda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren di samping mengusulkan peningkatan dana hibah untuk lembaga pendidikan nonformal seperti pondok pesantren, menurutnya, dapat menjadi barometer keberpihakan penda dan bentuk perlindungan terhadap pesantren. Sebagaimana UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, DPRD adalah bagian dari pemerintahan

daerah.

Di sisi lain, Ketua Bapemperda DPRD Demak H Marwan menjelaskan, untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan yang jelas terhadap pondok pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasan. Yang mengakomodasi perkembangan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, dalam kerangka hukum yang terintegrasi dan komprehensif sebagai bagian kearifan lokal Demak "Kota Seribu Pesantren".

Sehubungan itu, Bupati Demak dr Hj Eisti'nah menyampaikan, secepat pesantren di daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan fasilitasi pengembangan pondok pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. *sj

DIDUGA LANGGAR KODE ETIK KPK

Lili Pintauli Diperiksa Dewas

JAKARTA (KR) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), memeriksa Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar soal dugaan pelanggaran etik. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membenarkan hal itu meski yang melakukan pemeriksaan bukan dirinya.

"Sedang dilakukan pemeriksaan," kata Tumpak Hatorangan Panggabean di Jakarta, Senin (30/5). Meski demikian ia enggan berbicara lebih lanjut terkait pemeriksaan tersebut.

Selain itu, Tumpak menyebutkan pihaknya masih belum bisa memerinci materi pemeriksaan yang ditanyakan kepada yang bersangkutan.

Seperti diketahui, Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat

(NTB), dari salah satu badan usaha milik negara (BUMN).

Atas pemeriksaan ini, Tumpak mengaku tidak ikut memeriksa. "Yang memeriksa bukan saya, jadi saya tidak terlalu mendalami," ujarnya.

Dijelaskan, Dewas KPK terus mengumpulkan bahan keterangan dengan meminta keterangan dari beberapa pihak dalam rangka pembuktian dugaan pelanggaran etik Lili tersebut. "Masih banyak lagi yang diperiksa," ujar Tumpak.

Sebelumnya, Anggota Dewas KPK Albertina Ho pada Kamis (21/4) me-

ngatakan, Dewas KPK juga telah mengumpulkan bahan dan keterangan dari PT Pertamina (Persero). Jadi klarifikasi ya. Sekarang Dewas itu lagi pengumpulan bahan dan keterangan. Dari siapa? Dari semua pihak yang terkait, termasuk Pertamina.

"Kalau ditanya siapa, kami tidak bisa memberi tahu siapa yang akan kami klarifikasi," kata Albertina Ho.

Sebelumnya Lili pernah dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. Pasalnya, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. (Fu) d

REVITALISASI TERMINAL GIWANGAN YOGYAKARTA

Perhatikan Tata Pamong dan Tata Kelola

YOGYA (KR) - Revitalisasi Terminal Giwangan memang diperlukan agar aset tersebut memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat. Beberapa hal yang penting diperhatikan agar proyek berhasil adalah terkait dengan tata pamong (governance), dan tata kelola (manajemen). Karena berdasarkan pengalaman selama ini, adanya proyek mangkrak umumnya karena kesalahan tata pamong dan tata kelola, termasuk soal aset.

"Kesuksesan revitalisasi Terminal Giwangan menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk itu butuh komitmen semua pihak, termasuk yang berkaitan dengan tata pamong (governance) dan tata kelola (manajemen). Pasalnya, jika pengelolaan aset tidak tepat, maka pengembangan usaha terkait juga tidak akan berkembang baik," kata Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Dr Arif Wismadi

di Yogyakarta, Senin (30/5).

Kementerian Perhubungan segera melakukan revitalisasi sejumlah Terminal Tipe A yang ada di Indonesia termasuk Terminal Bus Giwangan Yogyakarta. Semua itu dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan jalan dengan fasilitas dan bangunan layaknya bandara. Terminal Giwangan menjadi salah satu proyek percontohan revitalisasi yang dilakukan.

Arif mengatakan, dari sisi desain, seoyongnya terminal juga menjadi hub atau simpul bangkitan dan tarikan perjalanan. Misalnya, penggabungan fasilitas publik, layanan komersial, pariwisata dan transportasi dengan hunian atau akomodasi di atasnya. Kondisi itu akan menjadikan Terminal Giwangan tidak hanya sebagai alternatif titik yang harus dilalui oleh angkutan umum, tapi juga sebagai tarikan dan bangkitan perjalanan. (Ria) d

DALAM INDEKS PARIWISATA GLOBAL

Indonesia Naik 12 Peringkat

JAKARTA (KR) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan, Indonesia menempati peringkat 32 atau naik 12 posisi dari 117 negara dalam Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) Tahun 2021, berdasarkan data yang dikeluarkan World Economy Forum pada Mei 2022.

"Kenaikan 12 peringkat ini kita capai dengan pandemi Covid-19 yang harus kita lalui dan begitu banyak kendala," ucap Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing yang dipantau secara virtual dari Jakarta, Senin (30/5).

Di Kawasan Asia Pasifik, lanjut Menparekraf, sektor pariwisata Indonesia berhasil masuk 10 besar dengan menempati peringkat delapan. Adapun di Asia Tenggara, Indonesia disebut masuk di posisi yang sangat bergengsi karena berhasil melampaui capaian dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia.

"Asia Pasifik merupakan kawasan dengan kinerja sektor pariwisata tertinggi kedua di dunia dan Indonesia ada di posisi yang sangat bisa dikategorikan luar biasa," ungkapnya.

Sandiaga Uno mengatakan, informasi ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian memerintahkan dirinya menyuarakan kenaikan peringkat Indonesia di TTCI ke publik. "Di tengah badai pandemi, di tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah anggaran yang terus dikurangi, kita bisa meningkatkan indeks kita sebanyak 12 peringkat secara mantap dan signifikan," ujar Menparekraf.

Adanya kenaikan peringkat ini dinilai membuat reputasi Indonesia di mata dunia semakin membaik, sehingga diharapkan para investor dapat berinvestasi di sektor pariwisata khususnya di lima Destinasi Super Prioritas (DSP), yakni di Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara

Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara.

Saat ini, pihaknya sedang mempelajari 112 indikator TTCI 2021 dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan peringkat Indonesia di Indeks Pariwisata Global pada tahun-tahun mendatang.

"Kita akan terbitkan sendiri juga yang versi Indonesia, yaitu Travel and Tourism Indeks atau Indeks Pariwisata dan Perjalanan Indonesia untuk membangkitkan semangat mulai dari teman-teman di provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa wisata," kata Sandiaga.

Chief Marketing Officer (CMO) Traveloka Shirley Lesmana menyebutkan wisata di Tanah Air kembali mulai bergairah terutama di April-Mei 2022 yang bertepatan dengan kembalinya dilakukan tradisi mudik Hari Raya Idul Fitri. (Ant) San) d



KR-Antara/Anis Eftuzdin

WISATA ALAM SIGANDUL: Pengunjung berdiri di jembatan kaca kompleks wisata alam Sigandul View di kawasan lereng Gunung Sindoro, Desa Tlahab, Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, Senin (30/5). Wisata alam di jalur menuju Dataran Tinggi Dieng tersebut menjadi destinasi wisata baru yang menawarkan keindahan dan kesejukan udara pegunungan.

Menag Usulkan Tambahan Biaya Operasional Haji

JAKARTA (KR) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta tambahan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun demi kepentingan operasional penyelenggaraan Haji 2022 bagi para calon jemaah asal Indonesia di Arab Saudi. "Totalnya Rp 1.518.056.480.730,89," kata Menag saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (30/5).

Penambahan anggaran itu, karena Arab Saudi menetapkan paket layanan angkutan bus selama musim haji (masyair) sebesar Saudi Arab Rial (SAR) 5.656,87 perjemaah. Sementara itu, Komisi VIII DPR bersama pemerintah pada rapat per 13 April 2022 menyepakati biaya masyair sebesar SAR 1.531,02 perjemaah.

"Terjadi kekurangan SAR 4.125,02 perjemaah atau secara keseluruhan sebesar SAR 380.516.587,42 atau setara Rp 1.463.721.741.330,89," jelas Menag.

Salah satu masyair itu bisa dibebankan dari nilai manfaat keuangan dan dana efisiensi haji. Selain itu, ada pula biaya selisih kurs sebesar Rp 19.279.594.400,00 dan penambahan haji khusus Rp 9.321.913.000,00.

Sementara itu Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pembangunan Embarkasi Haji Indramayu terus dikebut dan diharapkan pada tahun 2023 sudah selesai dan bisa digunakan untuk pemberangkatan jemaah calon haji (JCH). "Tinggal dua item lagi yaitu pembangunan masjid sudah dimulai tapi belum selesai dan juga jalan lingkungan," kata Uu di Indramayu, Senin.

Uu mengatakan, pembangunan dua item tersebut, diharapkan bisa segera selesai, dan nantinya pada tahun 2023 Embarkasi Haji Indramayu dapat digunakan. (Ati) d

DUGAAN PEMBERIAN KASUS EKSPOR CPO

Istri Dirjen Ikut Diperiksa

JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Terkait hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Agung, Ketut Sumedana mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa istri Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW).

"FS selaku istri tersangka IWW diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor 'crude palm oil' (CPO) dan turunannya," jelas Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (30/5).

Ia mengungkapkan, FS diperiksa bersama lima saksi lainnya, yakni saksi berinisial BA selaku Kepala Bagian Perencanaan Biro Umum dan Layanan Pengadaan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, BG selaku pensiunan Kementerian Perdagangan, R selaku Analis Perdagangan Ahli Madya, saksi DS selaku Finance Departemen Head Wilmar Group, dan PD selaku Subkoordinator Pembinaan Usaha Perkebunan.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan," kata Ketut.

Seperti diberitakan, Kejagung telah menetapkan tersangka lima orang dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng yang terjadi pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Kelima tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag. (Fu) d

MELARIKAN DIRI KE KALTIM

DPO Penganiayaan Ditangkap

TEMANGGUNG (KR) - Buron kasus penganiayaan, Tg (45), warga Tlahap Kledung Temanggung berhasil ditangkap polisi saat dalam pelarian di pedalaman Kalimantan Timur (KalTIM). Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi mengatakan Tg ditangkap tim resmob jajaran Polda Kaltim di sebuah angkutan.

"Tersangka tidak berkulit, akhirnya menyerah dan mau diperiksa di Polda Kaltim untuk selanjutnya dibawa ke Temanggung," kata Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi, Senin (30/5).

Tg melarikan diri usai melakukan tindak kejahatan pemerasan dan penganiayaan terhadap sopir truk Didik (27), warga Selomerto Wonosobo di Jalan Parakan-Wonosobo tepatnya di Desa Tlahap Kledung.

Tg beraksi bersama seorang residivis, AR (27) yang telah ditangkap lebih dulu dan di-jebloskan ke tahanan. Dari keterangan AR ini, Tg melarikan diri ke Kalimantan.

Peristiwa itu terjadi diawali dengan AR dan Tg yang pura-pura kecelakaan akibat tersenggol truk yang dikemudikan Didik sekitar dua minggu lalu. Keduanya naik sepeda motor Satria Fu yang dijadikan barang bukti kejahatan.

Didik yang merasa ada benturan, lantas menepi dan berhenti. AR dan Tg lantas menandatangani Didik sejurus kemudian me-

mukul korban satu 1 kali di bagian bibir sebelah kanan. "Tg lalu memukul korban dengan menggunakan paving mengenai bagian kepala dan tangan korban sebanyak 10 kali," katanya.

Tg menyeret korban keluar dari truk dan dibawa ke sebuah gang kampung kemudian korban dicekik lehernya dan dimintai uang. Karena terancam korban menyerahkan uang Rp 200.000. AR, menepikan truk milik korban dan mengambil handpone yang ada di dalam truk. Selanjutnya korban disuruh pulang.

Korban lalu melaporkan kejadian itu ke Polsek Parakan yang ditindaklanjuti dengan pencarian. Sinyal HP korban terdeteksi dan diketahui keberadaan pelaku kemudian dilakukan penangkapan. Para tersangka dijerat pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

Kasi Humas Polres Temanggung AKP Ari Fajar Sugeng mengatakan, tersangka AR adalah residivis pencurian sepeda motor pada tahun 2019 dengan tempat kejadian perkara di Candiroto.

Tersangka AR mengatakan, beraksi dengan pura-pura kecelakaan terserempet truk. Aksi telah dirancang dan dicari sopir truk yang sendirian serta berada di lintasan turunan dan tikungan karena laju kendaraan pelan. (Osy) d